

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon 2020



Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon 2020





Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2020 Kota Cirebon

I S S N :
Nomor Publikasi/Publication Number : 32740. 2104
Katalog BPS/BPS Catalogue : 4102004.3274

Ukuran Buku/Book size : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman/Number of page : 52 halaman

NASKAH / MANUSCRIPT : Agung Nur Rakhmawati, SST

GAMBAR KULIT / COVER DESIGN : Muhammad Maftuhin, SST

DITERBITKAN OLEH / PUBLISHED BY : Badan Pusat Statistik Kota Cirebon
Statistics Office of Cirebon Municipality

Boleh mengutip dengan menyebutkan sumbernya.
May be cited with reference to the source.



**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2020
KOTA CIREBON**

Tim Penyusun

Pengarah : Joni Kasmuri, SST, SE, ME

Penanggung Jawab : Ipan Parin S, S.Si, M.Ec.Dev

Naskah : Agung Nur Rakhmawati , SST

Pengolah Data : BPS

Gambar Kulit : Muhammad Maftuhin, SST

Penyunting : Ipan Parin S, S.Si, M.Ec.Dev

<https://cirebonkota.bps.go.id>



Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020 menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Cirebon antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari BPS hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020, dan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Jawa Barat 2015-2025 Hasil Supas 2015.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Cirebon

Joni Kasmuri, SST SE ME
NIP. 196801181989021001



<https://cirebonkota.bps.go.id>



Daftar Isi

	<i>Halaman</i>	
Kata Pengantar	3	
Daftar Isi	5	
Daftar Tabel	6	
Daftar Grafik	7	
BAB I	Kependudukan	
I.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk .. 10	
I.2	Kepadatan Penduduk	11
I.3	Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan .. 12	
I.4	Status Perkawinan	13
I.5	Penggunaan Alat/Cara KB.....	15
BAB II	Kesehatan	
2.1	Status Kesehatan	18
2.2	Penolong Persalinan.....	22
BAB III	Pendidikan	
3.1	Kemampuan Membaca dan Menulis	24
3.2	Partisipasi Sekolah	25
BAB IV	Ketenagakerjaan	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	29
BAB V	Pola Konsumsi	
	Pengeluaran Rumah Tangga	35
BAB VI	Perumahan dan Lingkungan	
6.1	Kualitas Rumah Tinggal	38
6.2	Fasilitas Rumah Tinggal	39
6.3	Status Kepemilikan Rumah Tinggal	41
BAB VII	Kemiskinan	
7.1	Perkembangan Penduduk Miskin	45
7.2	Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	46
BAB VIII	Sosial Lainnya	
8.1	Teknologi Infomasi	50
8.2	Perlindungan Sosial	51



DAFTAR TABEL

		<i>Halaman</i>
Tabel 1	APS dan APM Penduduk Kota Cirebon, 2018-2020	26
Tabel 2	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Penduduk Kota Cirebon, 2018-2019	27
Tabel 3	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan, 2019-2020.....	35

<https://cirebonkota.bps.go.id>



DAFTAR GRAFIK

		<i>Halaman</i>
Grafik 1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2016-2020	11
Grafik 2	Kepadatan Penduduk Kota Cirebon Tahun 2016-2020	11
Grafik 3	Struktur Umur Penduduk Kota Cirebon, 2020 (000 jiwa)	13
Grafik 4	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Status Perkawinan, 2019-2020	14
Grafik 5	Persentase Penduduk 15-49 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2019-2020	15
Grafik 6	Persentase Perempuan Berstatus Kawin dan Berumur 15-49 Tahun Menurut Status Penggunaan Alat/ Cara KB Tahun 2019-2020	16
Grafik 7	Umur Harapan Hidup Kota Cirebon, 2015-2019	19
Grafik 8	Angka Kesakitan, 2016-2020	20
Grafik 9	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan, 2016-2020	21
Grafik 10	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir, 2019-2020	22
Grafik 11	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2019-2020	25
Grafik 12	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas dan Angkatan Kerja, 2019	30
Grafik 13	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin, 2019	31
Grafik 14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2018 dan 2019	32
Grafik 15	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, 2018 dan 2019	33
Grafik 16	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator	39



	Kualitas Perumahan, 2020	
Grafik 17	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan Tahun 2019-2020	40
Grafik 18	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah, 2019-2020	41
Grafik 19	Jumlah Penduduk Miskin, 2018-2020 (Maret, ribuan jiwa)	46
Grafik 20	Garis Kemiskinan, 2018-2020 (Rupiah/ Kapita/Bulan)	47
Grafik 21	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), 2018-2020	48
Grafik 22	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 2017-2019	48
Grafik 23	Persentase Anggota RT Berusia 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Penggunaan Teknologi Informasi, 2020	50
Grafik 24	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial,2020	52

<https://cirebonkota.bps.go.id>



Bab I

Kependudukan

<https://cirebonkota.go.id>



Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk (Undang-Undang No. 24 Tahun 2013).

Dari waktu ke waktu jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Teori Malthus menjelaskan bahwa pertambahan jumlah penduduk mengikuti deret geometri. Jumlah penduduk yang tinggi akan menjadi kendala pembangunan apabila tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduknya. Oleh karena itu, data kependudukan diperlukan dalam perencanaan pembangunan antara lain penyediaan fasilitas pelayanan publik, penyediaan tenaga terampil maupun ahli, pembangunan infrastruktur, dan penentuan program yang tepat sasaran.

Tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (berusia dibawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Bonus demografi menjadi sebuah kesempatan emas ketika dapat memanfaatkannya dengan optimal. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia akan menjadi modal Indonesia menjadi negara maju.

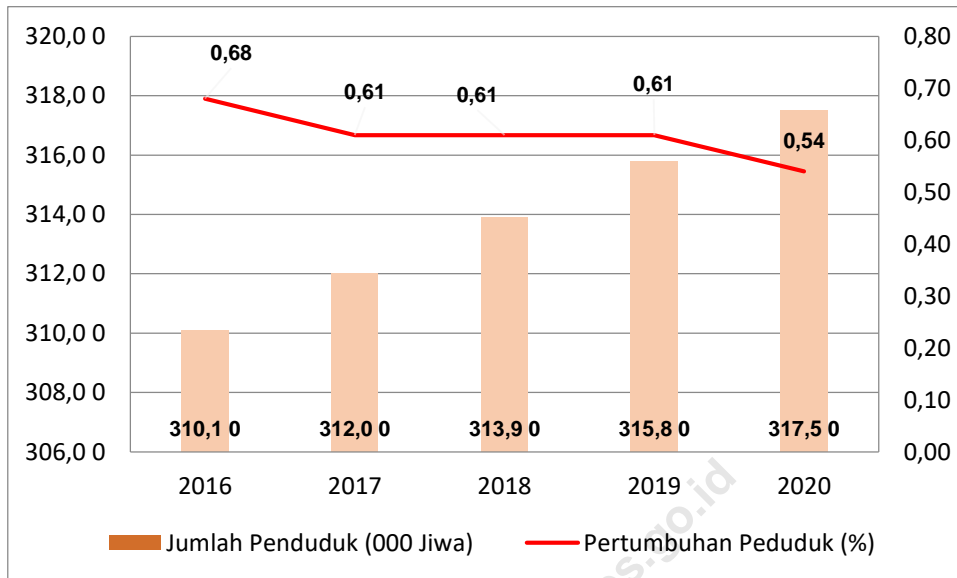
1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2025, penduduk Kota Cirebon pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 317,5 ribu jiwa. Metode yang digunakan dalam penghitungan angka proyeksi ini adalah metode geometrik, yang menggunakan asumsi jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar perhitungan bunga majemuk. Laju pertambahan penduduk dianggap sama untuk setiap tahun.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat berjumlah 49.565,2 ribu jiwa. Apabila dibandingkan, jumlah penduduk Kota Cirebon sekitar 0,64 persen dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat.



Grafik 1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Cirebon, 2016-2020

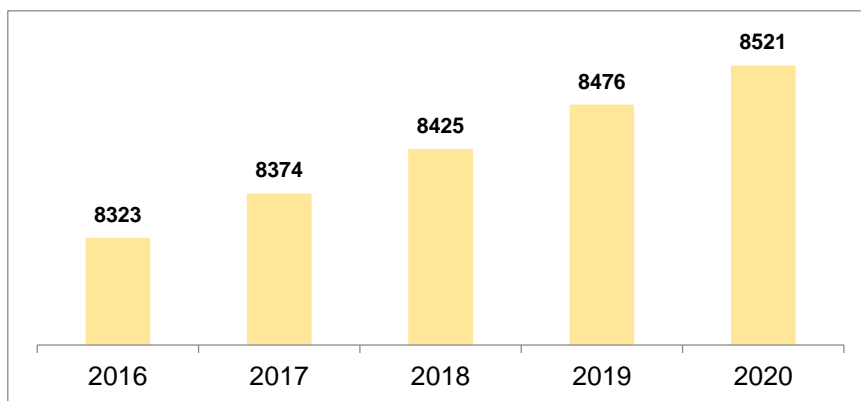


Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2025

1.2 Kepadatan Penduduk

Selain jumlah penduduk, persoalan yang terjadi di kota adalah kepadatan dan distribusi penduduk yang tidak merata antar wilayah. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk Kota Cirebon sebesar 8.521. Angka tersebut mempunyai makna bahwa, pada setiap 1 km² terdapat 8.521 jiwa penduduk. Kepadatan jumlah penduduk Kota Cirebon mengalami peningkatan seiring dengan penambahan jumlah penduduknya.

Grafik 2.
Kepadatan Penduduk Kota Cirebon, 2016-2020





1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah. Sedangkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) menunjukkan berapa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Komposisi penduduk Kota Cirebon menurut jenis kelamin adalah sama. Hal tersebut ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin penduduk Kota Cirebon pada tahun 2020 sebesar 100. Artinya, pada setiap 100 penduduk perempuan yang tinggal di Kota Cirebon terdapat 100 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.

Gambar 1.

Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Cirebon 2017-2020



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2025

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan perbandingan penduduk usia yang belum dan tidak produktif lagi dengan jumlah penduduk usia produktif. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin rendahnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

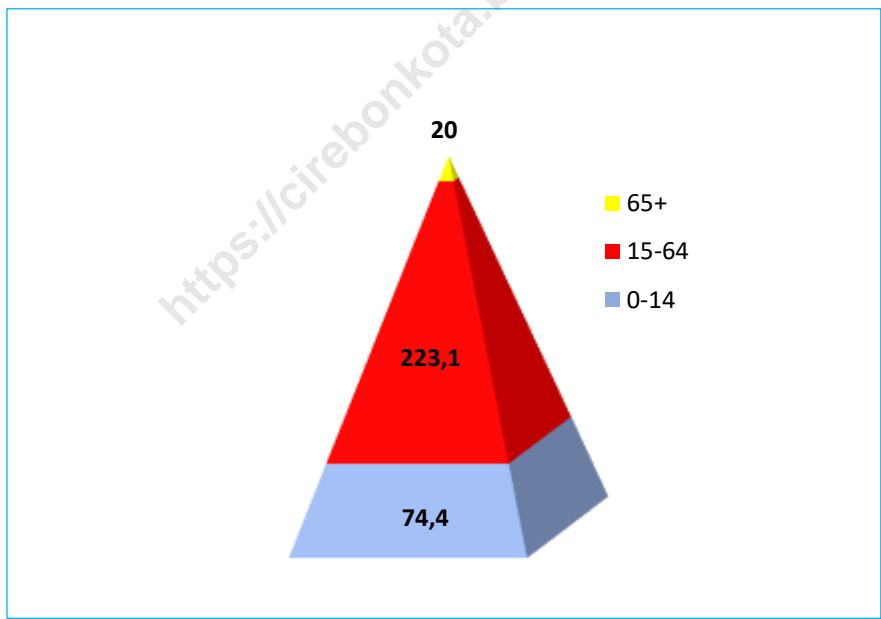
Penduduk Kota Cirebon pada tahun 2020 didominasi penduduk usia produktif, hal tersebut terlihat dari angka beban ketergantungan sebesar 42,31. Hal



ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 42 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Angka beban ketergantungan pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan angka beban ketergantungan pada tahun 2019 (42,59)

Struktur umur penduduk Kota Cirebon didominasi oleh penduduk usia produktif. Persentase penduduk usia muda (0-14) tahun sebesar 23,43 persen. Persentase penduduk usia tua (65+) sebesar 6,30 persen. Sementara persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebesar 70,27 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Cirebon sangat potensial sebagai modal dasar untuk pembangunan.

Grafik 3
Stuktur Umur Penduduk Kota Cirebon, 2020
(000 jiwa)



Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2015-2025

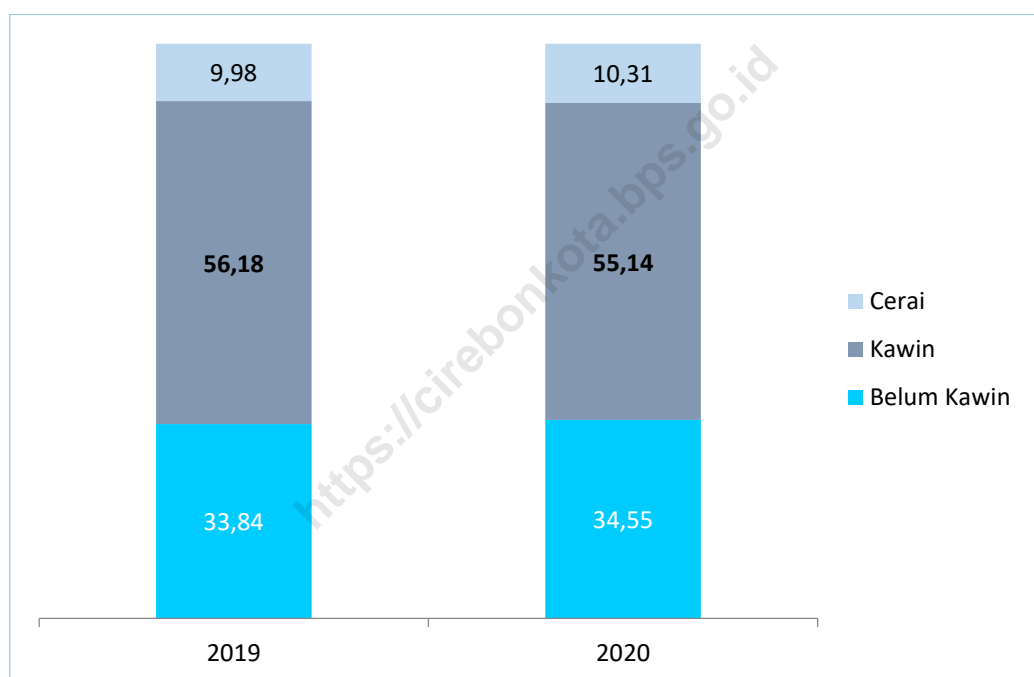
1.4 Status Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia erat kaitannya dengan keturunan.



Berdasarkan data hasil Susenas tahun 2020, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus belum kawin sebanyak 34,55 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 33,84 persen. Selanjutnya, persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus kawin sebanyak 55,14 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 56,18 persen. Sedangkan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus cerai adalah 10,31 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,98 persen.

Grafik 4.
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas
Berdasarkan Status Perkawinan, 2019-2020



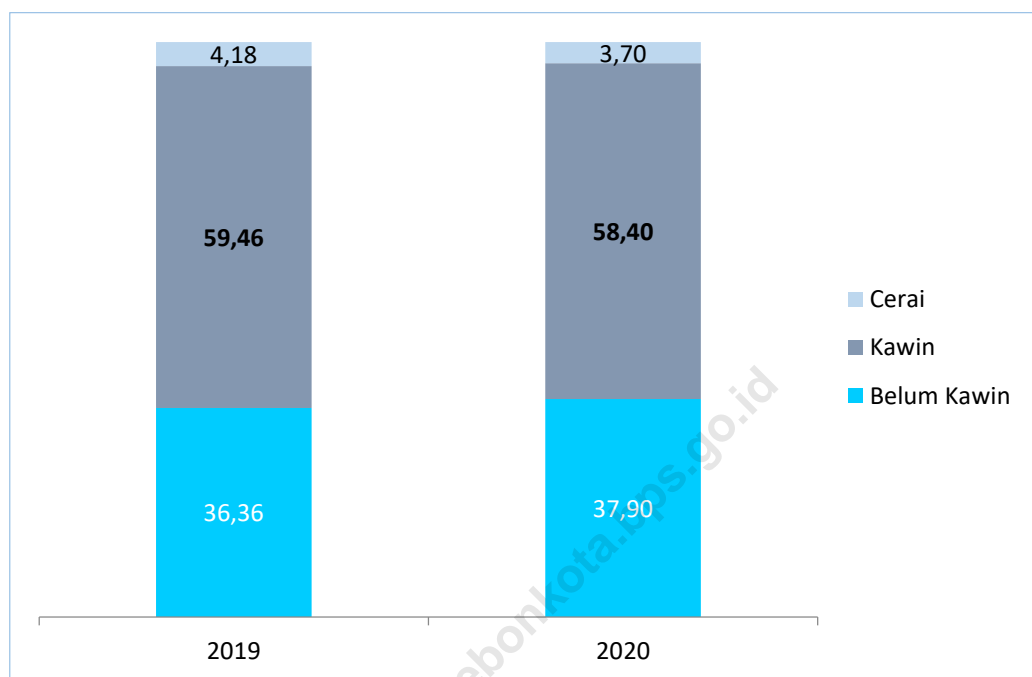
Sumber : Susenas 2020

BPS membedakan penduduk usia produktif menjadi dua kategori, yaitu penduduk sangat produktif pada usia 15-49 tahun dan penduduk usia produktif pada usia 50-64 tahun. Berdasarkan data hasil Susenas tahun 2020, persentase penduduk di Kota Cirebon yang berusia 15-49 tahun dan berstatus belum kawin sebanyak 37,90 persen atau lebih tinggi dibandingkan persentase tahun 2019 yakni sebanyak 36,36 persen. Selanjutnya, persentase penduduk di Kota Cirebon yang berusia 15-49 tahun dan berstatus kawin sebanyak 58,40 persen, lebih rendah dibandingkan persentase pada tahun 2019 yakni sebanyak 59,40 persen.



Sementara penduduk usia 15-49 tahun yang berstatus cerai sebanyak 3,70 persen, lebih rendah dibandingkan persentase tahun 2019 yakni sebanyak 4,18 persen.

Grafik 5.
Persentase Penduduk 15-49 Tahun
Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2019-2020



Sumber : Susenas 2020

1.5 Penggunaan Alat/ Cara KB

Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Kebijakan pembangunan manusia dimulai dari perencanaan kehidupan berkeluarga, merencanakan jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan, seribu hari pertama kehidupan, pendidikan anak usia dini sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (Bapenas, 2020).

Struktur penduduk Indonesia saat ini ditandai meningkatnya penduduk usia produktif. Kondisi ini memberikan peluang mendapatkan bonus demografi dengan salah satu prasyarat yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

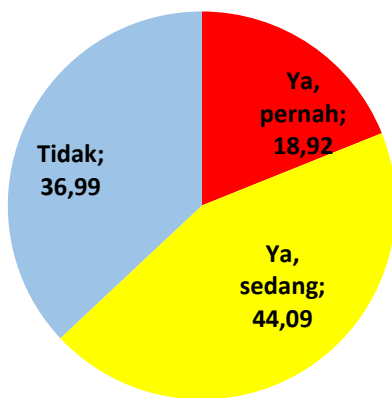


Struktur penduduk harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran.

Grafik 6.

**Persentase Perempuan Berstatus Kawin dan Berumur 15-49 Tahun
Menurut Status Penggunaan Alat/ Cara KB
Tahun 2019 dan Tahun 2020**

Tahun 2019



Tahun 2020



Berdasarkan data hasil Susenas Tahun 2019 dan Tahun 2020, persentase perempuan berstatus kawin usia 15-49 tahun di Kota Cirebon yang sedang menggunakan alat/cara KB mengalami penurunan. Di dalam Renstra BKKBN Tahun 2020, menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern khususnya di kalangan kelompok usia produktif diperkirakan terjadi karena masih rendahnya pengetahuan pasangan muda tentang kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya terhadap alat kontrasepsi.



Bab II

Kesehatan

<https://cirebonkeppps.go.id>



Tujuan pembangunan nasional sebagaimana digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Amanat Konstitusi tersebut memandatkan kepada negara untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Salah satu dimensi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah dimensi pembangunan manusia dan masyarakat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan dan kesehatan dan perbaikan gizi. Pembangunan manusia Indonesia dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia sejak janin dalam kandungan sampai lanjut usia.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat terwujud.

Sasaran pembangunan kesehatan yang dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya umur harapan hidup saat lahir, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar yang berkualitas melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

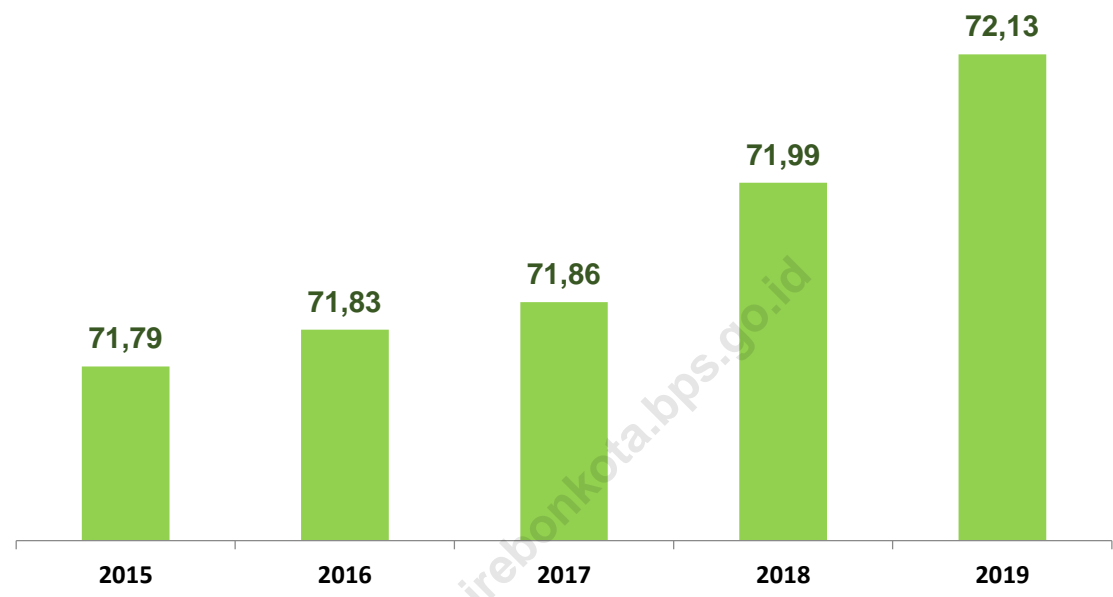
2.1 Status Kesehatan

Umur harapan hidup (UHH) saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Kota Cirebon telah berhasil meningkatkan umur harapan hidup penduduknya. Dalam periode tahun 2015 hingga tahun 2019, UHH terus



mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, UHH penduduk Kota Cirebon sebesar 72,13. Artinya, penduduk memiliki harapan hidup pada saat lahir hingga 72 tahun. Semakin tingginya umur harapan hidup mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Cirebon mengalami usia yang lebih panjang dari tahun ke tahun.

Grafik 7. Umur Harapan Hidup Kota Cirebon, 2015-2019



Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat 2020

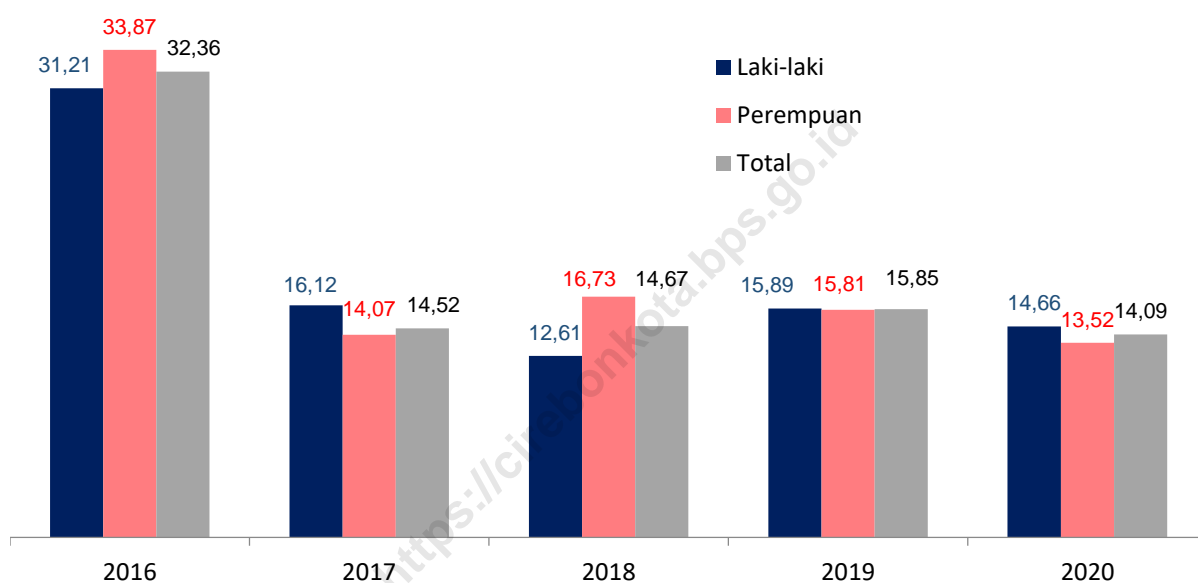
Peningkatan umur harapan hidup dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain semakin baik dan semakin mudah akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat. Selain itu, semakin baiknya perilaku hidup sehat masyarakat dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ditambah lagi daya dukung kondisi lingkungan yang semakin baik.

Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya, keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya (BPS).



Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Grafik 8. Angka Kesakitan, 2016-2020



Sumber : Susenas 2016-2020

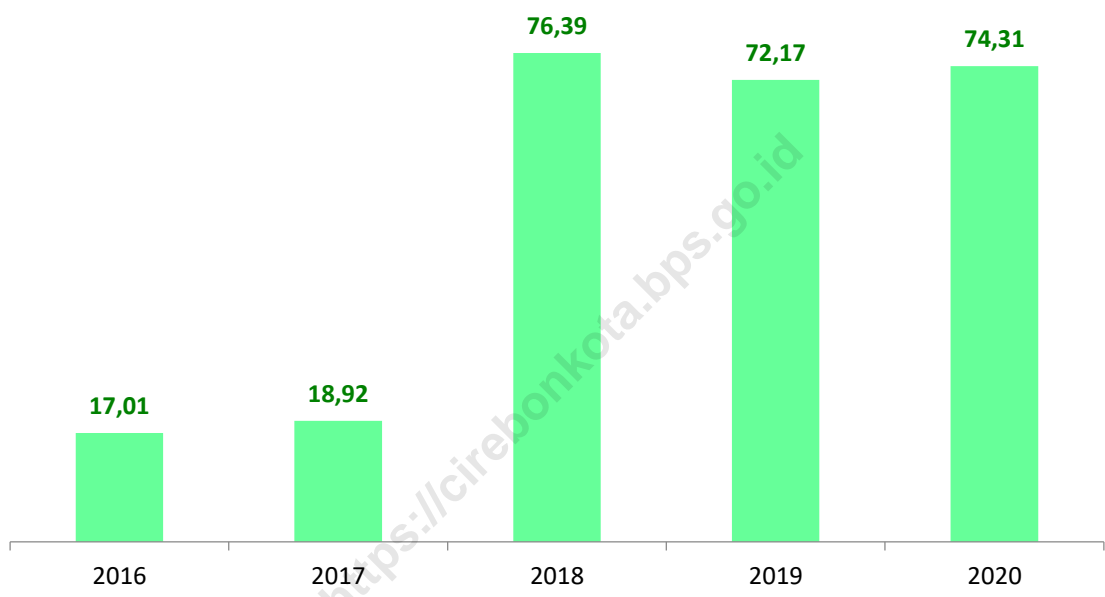
Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020 angka kesakitan penduduk Kota Cirebon sebesar 14,09 persen. Angka tersebut memberi makna bahwa terdapat 14 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Angka kesakitan pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketika seseorang sakit, maka sudah tentu orang yang sakit tersebut akan mengoptimalkan ikhtiarnya untuk mengembalikan kesehatannya agar aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Berbagai ikhtiar dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan untuk mengembalikan kesehatannya salah satunya adalah dengan berobat jalan. Berobat jalan adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan



mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke anggota rumah tangga. Akibat dari berobat jalan tentunya seorang yang memiliki keluhan kesehatan harus membayar biaya berobat jalan selama proses penyembuhannya.

Grafik 9.
Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jaminan Kesehatan,
2016-2020



Sumber : Susenas 2016-2020

Akses biaya kesehatan yang murah dan mudah terjangkau merupakan harapan semua lapisan masyarakat. Pemerintah mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan semua orang memiliki akses layanan kesehatan yang dibutuhkan dengan kualitas yang baik. Pada tahun 2019, persentase penduduk Kota Cirebon yang berobat jalan dan menggunakan jaminan kesehatan sebesar 72,17 persen atau mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020 persentase penduduk yang berobat jalan dan menggunakan jaminan kesehatan mengalami peningkatan menjadi 74,31 persen.



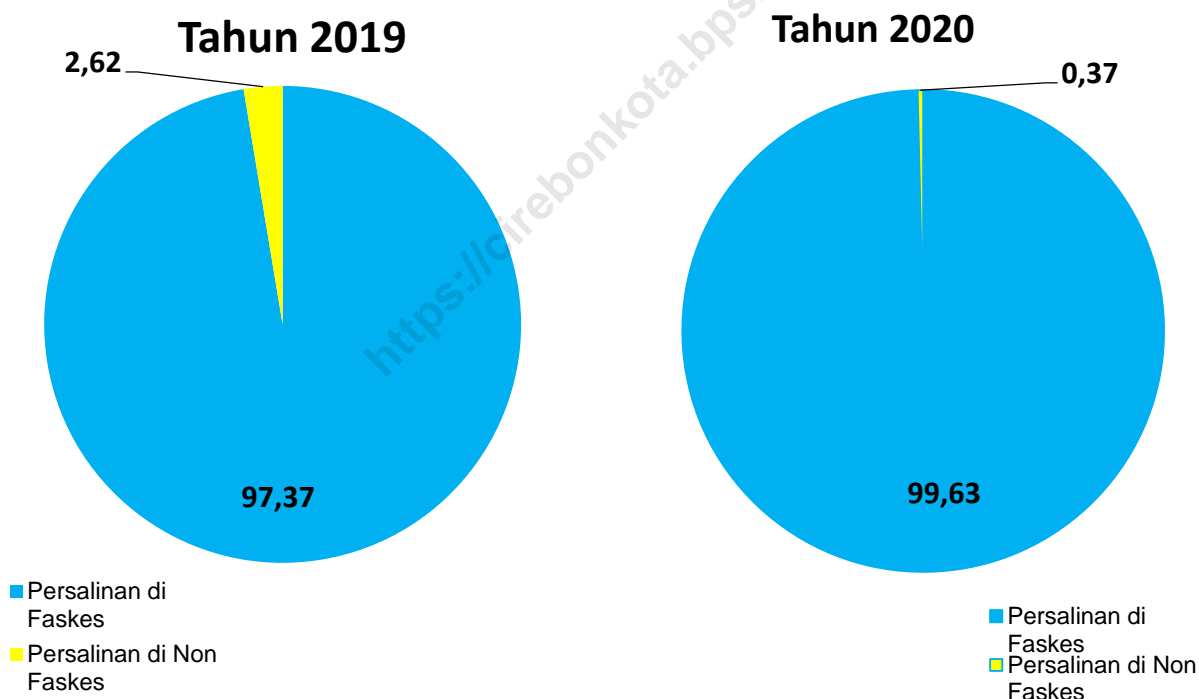
2.2 Penolong Persalinan

Angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi. Tingginya angka kematian ibu bisa disebabkan oleh perencanaan kehamilan yang kurang matang, sehingga perempuan melahirkan terlalu banyak, terlalu dekat, terlalu muda, atau terlalu tua. Selain itu, tingginya angka kematian ibu disebabkan oleh persalinan yang ditolong oleh tenaga yang tidak kompeten dalam bidang kebidanan.

Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Program Keluarga Harapan digulirkan untuk menjamin pemenuhan gizi ibu hamil dan pemenuhan kebutuhan persalinan terpenuhi.

Grafik 10.

Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Melahirkan Dalam 2 Tahun Terakhir, 2019-2020



Sumber : Susenas 2019- 2020

Persentase persalinan di fasilitas kesehatan di Kota Cirebon sudah tinggi. Sebanyak 99,63 persen perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan dalam dua tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup yang terakhirnya di fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud meliputi rumah sakit, klinik bersalin, dan puskesmas.



Bab III

Pendidikan

<https://cirebon.go.id>



Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain kemampuan membaca dan menulis, angka partisipasi sekolah (APS), dan angka partisipasi murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (AMH) atau *literacy rate*. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Penduduk usia 15 tahun ke atas merupakan komponen masyarakat yang potensial, yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis huruf latin. Pada

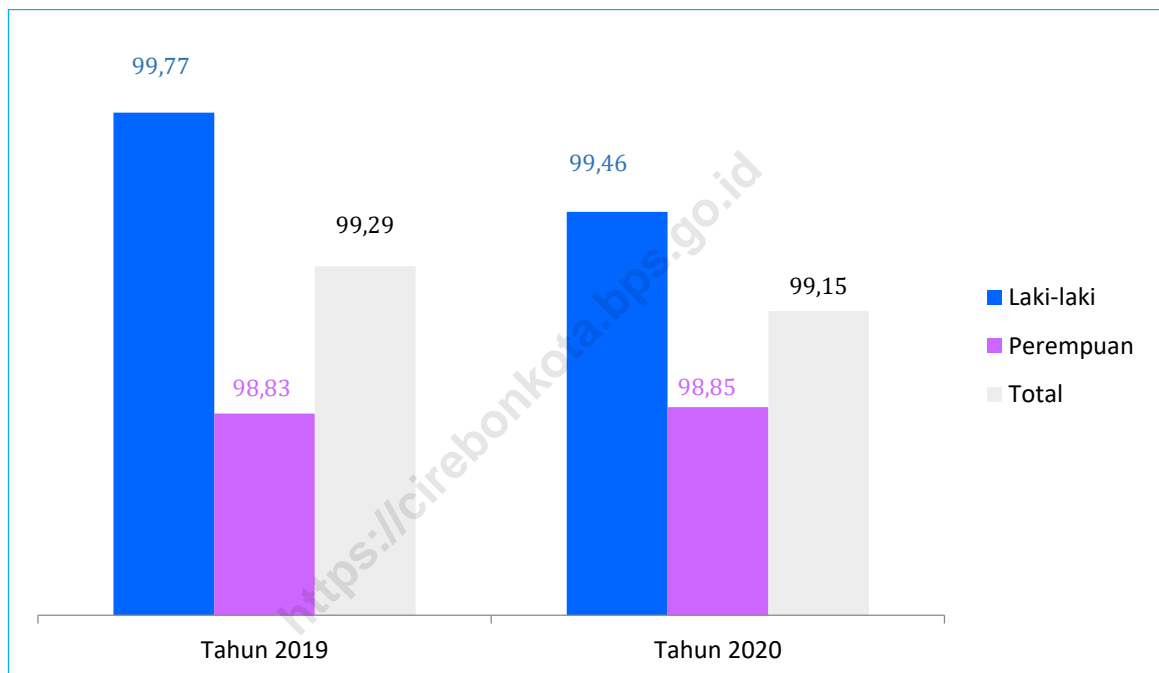


tahun 2020, masih terdapat 0,85 penduduk yang belum dapat membaca dan menulis huruf latin.

Tingkat literasi penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, hal tersebut dapat dilihat dari persentase penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk perempuan.

Grafik 11.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2019-2020



Sumber : Susenas 2019- 2020

3.2 Partisipasi Sekolah

Salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menjamin bahwa sampai dengan tahun 2030 semua anak, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar (*primary schooling*). Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2020, masih terdapat sekitar 0,13 persen penduduk usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Pada kelompok penduduk usia 13-15 tahun, masih terdapat sekitar 7,06 persen penduduk yang



tidak bersekolah. Selanjutnya, pada penduduk kelompok usia 16-18 tahun masih terdapat 24,84 persen penduduk yang tidak bersekolah.

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Namun, informasi yang diperoleh dari APS tidak memperhitungkan anak pada suatu kelompok yang benar-benar bersekolah pada jenjangnya.

Tabel 1. APS dan APM Penduduk Kota Cirebon, 2018-2020

Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
	2018	2019	2020
7-12 tahun	99,64	99,55	99,87
13-15 tahun	91,54	92,57	92,94
16-18 tahun	74,82	75,85	75,16
Angka Partisipasi Murni (APM)			
SD	94,85	95,45	95,29
SMP	71,91	70,54	70,79
SMA	65,93	66,85	66,75

Sumber : Susenas 2019-2020

Angka partisipasi murni (APM) merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Pada tahun 2020, capaian APM usia SD di Kota Cirebon adalah 95,29 persen. APM SMP mencapai 70,79 persen, artinya masih ada sekitar 29 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang SMP. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019, kondisi APM pendidikan menengah atau mengalami peningkatan. Sementara itu, APM usia SMA baru mencapai 66,75 artinya masih ada sekitar 33 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMA. APM usia SMA pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun 2019



**Tabel 2. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Penduduk Kota Cirebon, 2018-2019**

Indikator	Laki-Laki		Perempuan		Total	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Rata-rata Lama Sekolah (penduduk usia 25+ tahun)	10,43	10,47	9,31	9,31	9,89	9,90
Harapan Lama Sekolah (penduduk usia 7+ tahun)	12,77	12,78	13,38	13,40	13,09	13,11

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat 2019

Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah pada tahun 2019 mengalami peningkatan. Meningkatnya harapan lama sekolah dapat diartikan bahwa semakin baik peluang penduduk untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Di tahun 2019, harapan lama sekolah penduduk Kota Cirebon mengalami peningkatan dua poin menjadi 13,09 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2019 memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas pendidikan masyarakat suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2019 mencapai 9,90. Nilai tersebut memberi makna bahwa secara rata-rata penduduk Kota Cirebon pada tahun 2019 yang berusia diatas 25 tahun telah menyelesaikan pendidikannya hingga SMA kelas 1 tapi tidak selesai.



Bab IV

Ketenagakerjaan

<https://cibonkota.go.id>



Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2019 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator

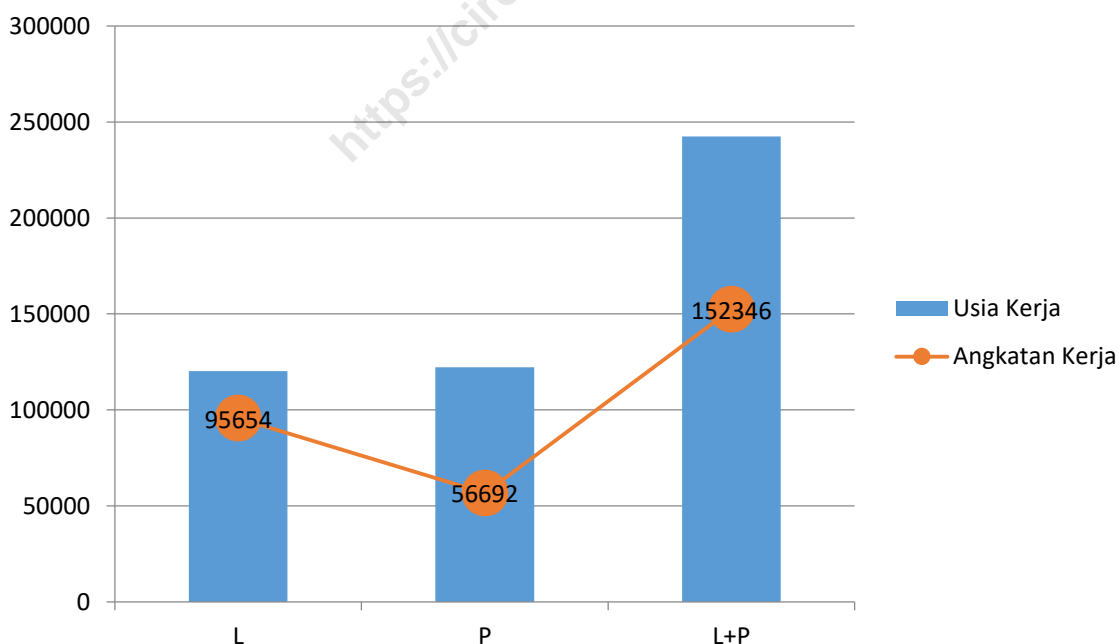


yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Cirebon Agustus 2019 sebanyak 242.448 orang. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada Agustus 2019 mencapai 152.346 orang. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja mencapai 90.102 orang.

Grafik 12. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja, 2019



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2019

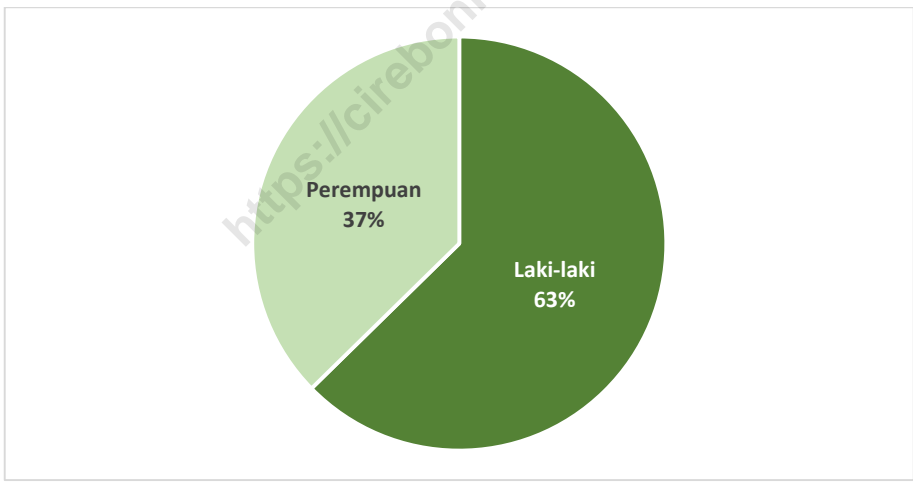


Jumlah penduduk laki-laki usia kerja pada periode Agustus 2019 sebesar 120.227 orang. Sedangkan untuk penduduk perempuan usia kerja sebesar 122.221 orang.

Dari total angkatan kerja sebanyak 152.346 orang pada Agustus 2019, sebanyak 91,02 persennya melakukan aktivitas bekerja atau sebanyak 138.667 orang. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, maka jumlah penduduk bekerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Pada keadaan Agustus 2019 jumlah penduduk bekerja laki-laki mencapai 86.889 orang, sedangkan perempuan sebanyak 51.778 orang.

Grafik 13. Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin, 2019



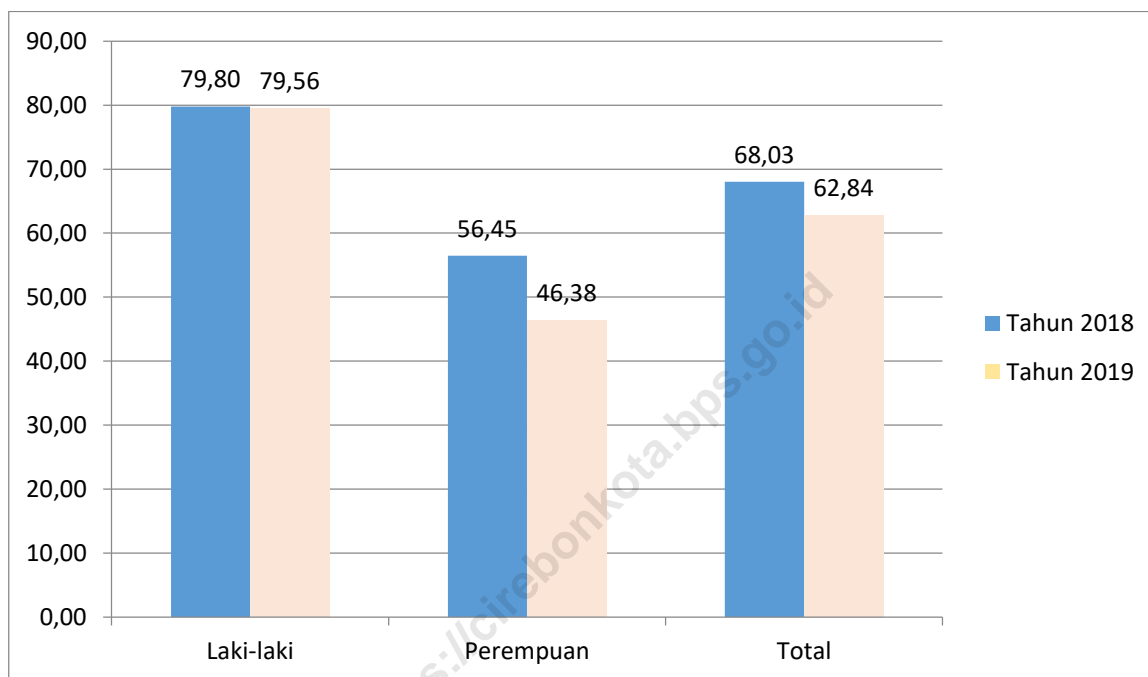
Sumber : Sakernas, Agustus 2019

Terdapat perbedaan pergerakan TPAK menurut jenis kelamin antara Agustus 2019 dengan tahun sebelumnya. TPAK laki-laki menunjukkan penurunan dari 79,80 persen pada Agustus tahun 2018 menjadi 79,56 persen pada Agustus tahun 2019. Demikian juga TPAK perempuan menunjukkan penurunan dari 56,45 persen pada Agustus tahun 2018 menjadi 46,38 persen pada Agustus tahun 2019. Secara keseluruhan TPAK laki-laki dan perempuan mengalami penurunan dari 68,03 persen



pada Agustus tahun 2018 menjadi 62,84 persen pada Agustus tahun 2019. Tahun 2019, TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Grafik 14. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2018-2019



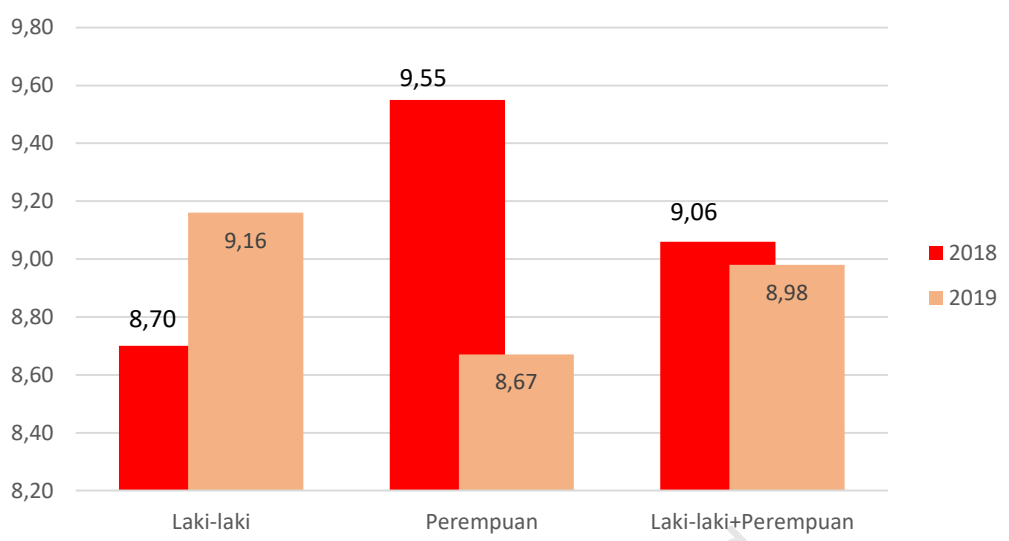
Sumber : Sakernas, Agustus 2018 dan 2019

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) keadaan Agustus 2019 di Kota Cirebon mengalami penurunan dibandingkan keadaan Agustus 2018, yaitu 9,06 persen pada tahun 2018 menjadi 8,98 persen pada tahun 2019. Apabila dipilah menurut jenis kelamin, TPT laki-laki mengalami peningkatan yaitu dari 8,70 persen di tahun 2018 menjadi 9,16 persen di tahun 2019. Hal sebaliknya terjadi pada TPT perempuan, yang juga mengalami penurunan, yaitu 9,55 persen pada keadaan Agustus 2018 menjadi 8,67 persen pada keadaan Agustus 2019.



Grafik 15.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, 2018-2019



Sumber : Sakernas, Agustus 2018 dan 2019

<https://cirebonkota.bps.go.id>



Bab V

Pola Konsumsi

<https://cirebonkota.bps.go.id>



Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 3. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Makanan dan Non Makanan, 2019-2020

Kelompok Barang	2019	2020
Makanan	673 891	654 100
Non Makanan	821159	820 119
Total	1 495 050	1 474 219

Sumber : Susenas Maret 2019- 2020



Sesuai dengan karakter perkotaan, di Kota Cirebon, persentase pengeluaran perkapita untuk kelompok non makanan masih mendominasi pengeluaran rumah tangga. Berdasar data Susenas antar tahun, dapat dicermati bahwa proporsi pengeluaran kelompok non makanan terus membesar di tahun 2020.

<https://cirebonkota.bps.go.id>



Bab VI

Perumahan dan Lingkungan

<https://cirebonkota.bps.go.id>



Manusia memiliki kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, dan papan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu juga rumah dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Status sosial seseorang yang makin tinggi, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik dan fasilitas yang lengkap. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

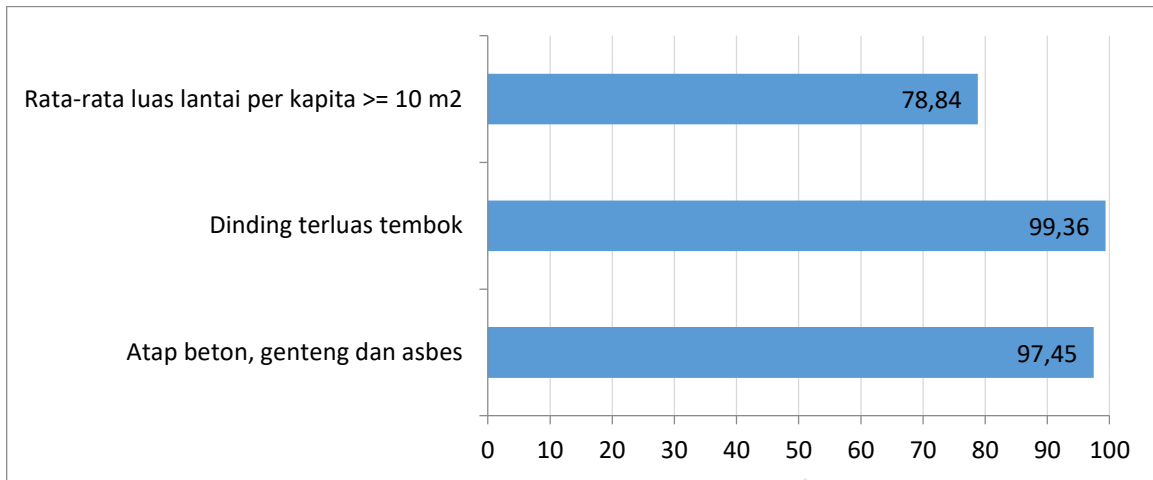
6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Terdapat beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok, dengan beratapkan beton, genteng dan asbes. Data hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah dengan dinding terluas dari tembok yaitu sebesar 99,36. Sementara itu, persentase rumah tangga yang tinggal di rumah dengan bahan bangunan atap dari beton, genteng dan asbes sebesar 97,45 persen.



Grafik 16.

Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2020



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2020

Menurut standar *World Health Organization* (WHO) tentang rumah layak huni menyebutkan bahwa rumah yang sehat adalah rumah dengan luas per kapitanya sebesar 10 m²/orang. Artinya dengan asumsi satu rumahtangga terdiri dari 4 (empat) orang maka rumah yang sehat menurut ukuran WHO, rumahtangga tersebut harus memiliki rumah idealnya minimal dengan luas 40 m². Adapun menurut Kementerian Kesehatan standar rumah sehat adalah dengan luas per kapitanya sebesar 8 m²/orang. Di samping tingkat derajat kesehatan penghuninya, luas lantai juga sering dianggap sebagai gambaran tingkat kesejahteraan/status sosial penghuninya. Semakin luas lantai yang dimiliki oleh suatu rumahtangga maka asumsinya semakin sehat dan sejahtera penghuninya. Bila merujuk pada standar WHO di mana luas per kapita ideal (minimal 10 meter persegi) maka persentase rumahtangga di Kota Cirebon dengan luas per kapita ideal sebesar 78,84 persen.

6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

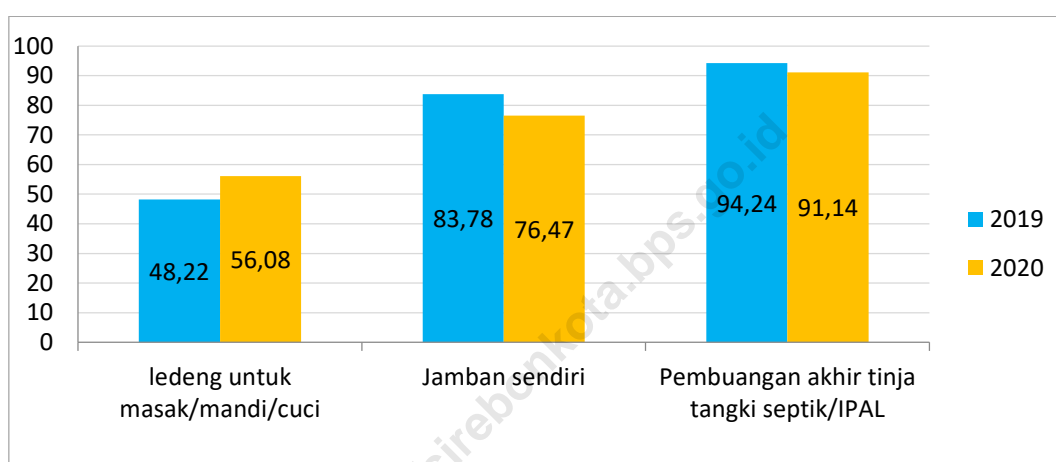
Fasilitas rumah tinggal merupakan pemenuhan atas kebutuhan aktivitas seluruh anggota rumah tangga. Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih yang tersedia dalam jumlah yang



cukup merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Sepuluh rumah tangga di Kota Cirebon tahun 2020 untuk keperluan masak/mandi/cuci menggunakan air ledeng, yaitu sebesar 56,08 persen. Selebihnya, untuk keperluan mandi/cuci, rumah tangga menggunakan sumur bor/pompa, sumur/mata air terlindung, dan sumur/mata air tak terlindung, serta air kemasan.

Grafik 17. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2019-2020



Sumber : Susenas 2019-2020

Selain fasilitas ketersediaan air bersih, sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang harus diperhatikan. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Dampak lebih lanjutnya menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Salah satu fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama tahun 2019-2020 persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban yang digunakan sendiri mengalami penurunan dari 83,78 persen menjadi 76,47 persen. Selain penggunaan jamban untuk digunakan sendiri, tersedianya jamban dengan fasilitas tangki septik/IPAL merupakan bagian kriteria rumah sehat.

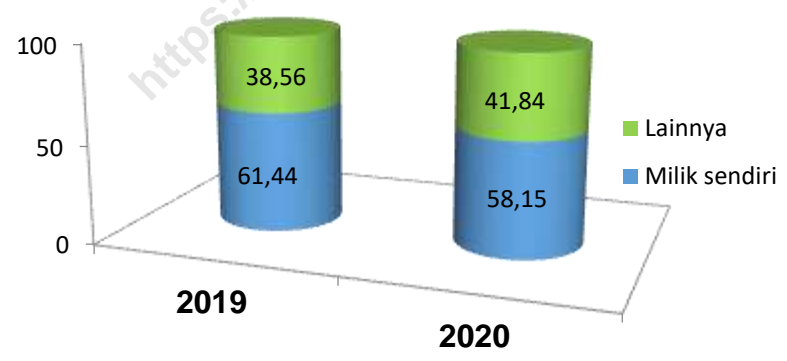


Pada tahun 2020 rumah tangga yang menggunakan jamban dengan fasilitas tangki septik/IPAL sebesar 91,14 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sudah mencapai 94,24 persen. Penurunan kedua indikator tersebut perlu mendapat perhatian supaya kualitas rumah sehat rumah tangga di Kota Cirebon terjaga.

6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Grafik 18. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah, 2019-2020



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Cirebon 2019 dan 2020

Hasil Susenas 2020 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah dengan status menempati rumah milik sendiri sebesar 58,15 persen. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri sebesar 41,84 persen. Status kepemilikan rumah tetap tidak akan mencapai 100 persen, hal ini dikarenakan



adanya penduduk yang tidak tinggal di suatu daerah secara permanen bukan karena ketidakmampuan memiliki rumah di tempat tersebut.

<https://cirebonkota.bps.go.id>



Bab VII

Kemiskinan

<https://cirebonkota.bps.go.id>



Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan



dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai pengganti *Millenium Development Goals (MDGs)* merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari \$1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

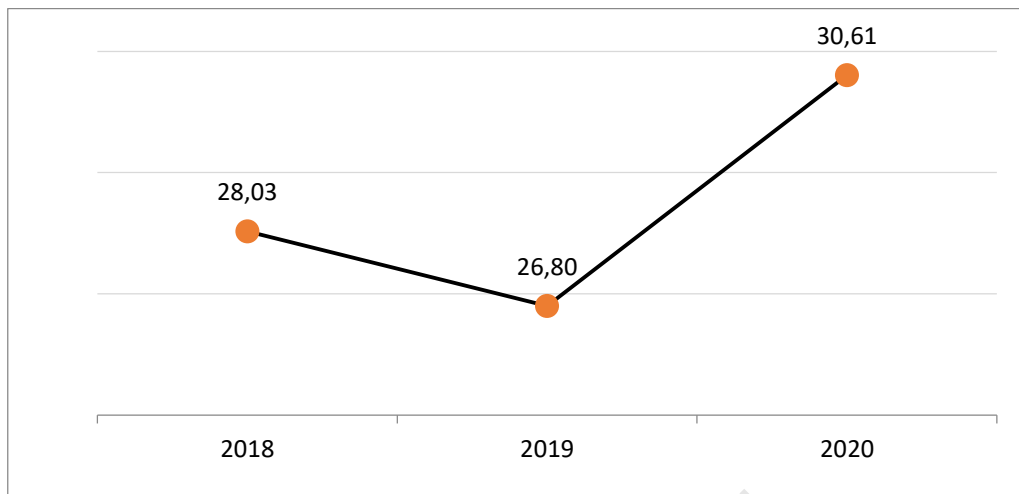
Persentase dan jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon pada tahun 2020 mengalami peningkatan setelah dua tahun sebelumnya mengalami penurunan. Pemerintah Kota Cirebon semakin gencar untuk menekan angka kemiskinan. Namun pandemi Covid-19 telah membuat persentase tersebut kembali mengalami kenaikan.

Pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin turun menjadi 28,03 ribu orang atau sebesar 8,88 persen dari jumlah penduduk Kota Cirebon. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 26,80 ribu orang atau 8,41 persen. Sebaliknya, pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 30,61 ribu orang atau 9,52 persen.



Grafik 19.

Jumlah Penduduk Miskin, 2018-2020 (Maret, ribu jiwa)



Sumber : Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2018-2020

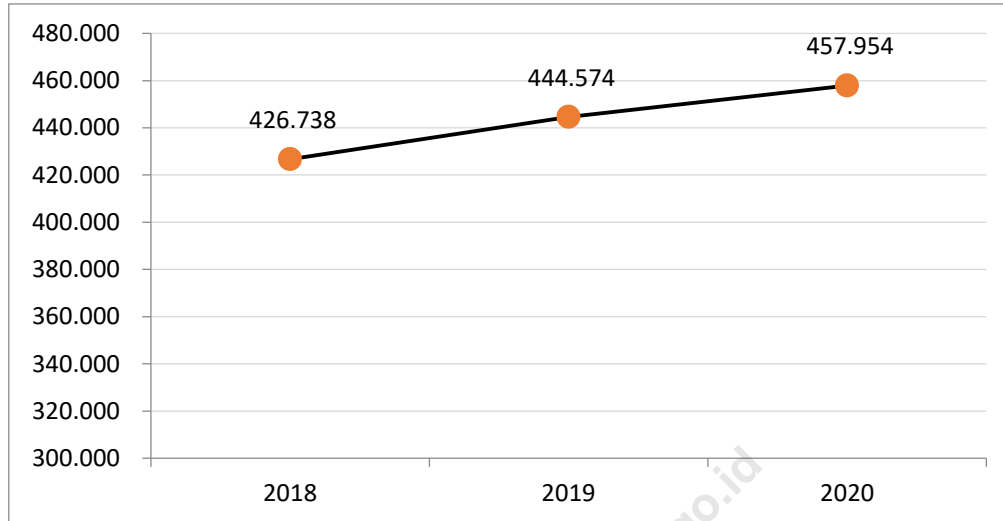
Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga; kondisi perumahan; dan persebarannya menurut kabupaten/kota. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Cirebon mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2018-2020. Garis kemiskinan tahun 2018 sebesar Rp. 426.738. Pada tahun 2019, meningkat menjadi Rp 444.574. Tahun 2020, garis kemiskinan terus mengalami peningkatan menjadi Rp. 457.954.



Grafik 20.
Garis Kemiskinan, 2018-2020
(Rupiah/Kapita/Bulan)



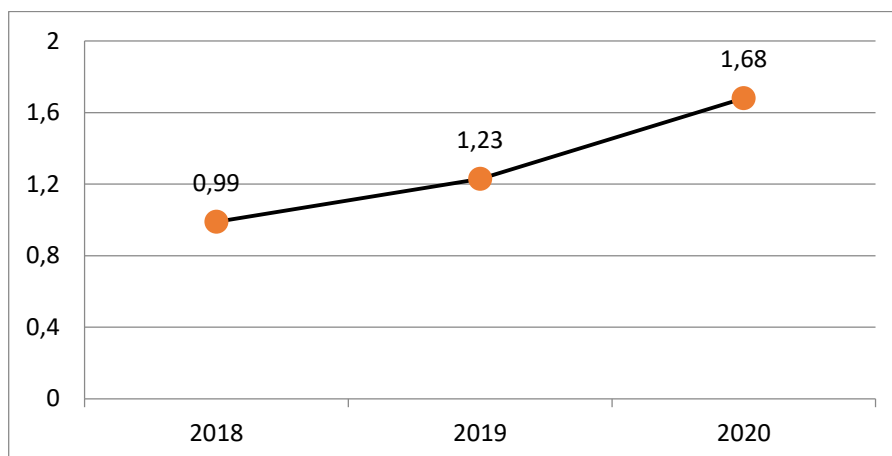
Sumber : Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2018-2020

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2018 – 2020 P1 mengalami peningkatan. Nilai P1 tahun 2018 sebesar 0,99, pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 1,23, dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2020 menjadi 1,68. Nilai P1 yang semakin tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Kondisi yang diharapkan adalah nilai P1 yang semakin kecil, artinya penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.



Grafik 21.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), 2018 - 2020

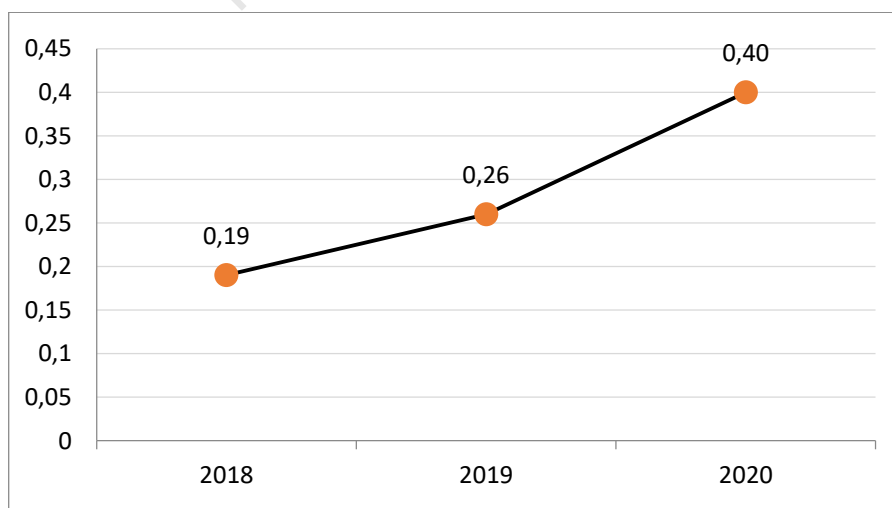


Sumber : Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2018-2020

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan nilai P1, nilai P2 juga mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020. Nilai P2 tahun 2018 sebesar 0,19, selanjutnya meningkat di tahun 2019 menjadi 0,26, dan tahun 2020 menjadi 0,40. Peningkatan nilai indeks menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi.

Grafik 22.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), 2018 - 2020



Sumber: Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, 2018-2020



Bab VIII

Sosial Lainnya

<https://cirebonkota.go.id>



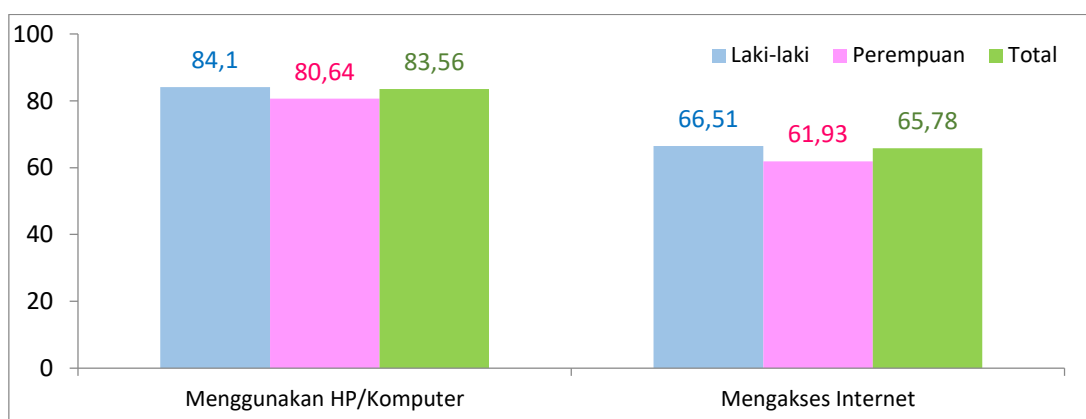
8.1. Teknologi Informasi

Peningkatan penggunaan telepon seluler (*handphone*) cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas alat teknologi informasi berupa telepon seluler. Saat ini mayoritas penggunaan telepon seluler selain digunakan sebagai alat komunikasi juga digunakan untuk mengakses internet. Telepon seluler selain mudah dibawa, praktis, bersifat pribadi, juga memungkinkan seseorang dapat melakukan berbagai aktivitas dalam waktu bersamaan. Hal inilah yang membuat penggunaan telepon seluler semakin meningkat.

Teknologi dalam telepon seluler semakin canggih. Selain dapat digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan tugas kantor, menyimpan file, mengedit dan menyimpan gambar, menikmati hiburan film dan lagu, dan lain-lain. Fitur-fitur yang tersedia dalam telepon seluler sudah mendekati fitur yang ada di dalam komputer. Apalagi dengan kemudahan akses internet, dunia seperti dalam genggaman tangan. Di tahun 2020, persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler/ komputer di Kota Cirebon mencapai 83,56 persen. Presentase penduduk laki-laki yang menggunakan HP/ komputer cukup tinggi, yaitu mencapai 84,10 persen. Sementara persentase penduduk perempuan yang menggunakan HP/ Komputer sebesar 80,64 persen.

Grafik 23.

Persentase Anggota RT Berusia 5 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Penggunaan Teknologi Informasi, 2020



Sumber: Susenas Maret 2020



8.2 Perlindungan sosial

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan bangsa. Selanjutnya dalam Pasal 34 UUD 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan negara wajib mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat nasional. Berpijak dari sana, pemerintah berusaha mewujudkan sistem perlindungan sosial di Indonesia.

Pasca krisis ekonomi 1998, program perlindungan sosial yang digulirkan oleh pemerintah semakin beragam. Tak hanya jaminan kesehatan, pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah, bantuan beras untuk masyarakat miskin, dan bantuan langsung tunai. Pemerintah juga mencanangkan berbagai program antarlain program keluarga harapan, PNPM Mandiri, dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem perlindungan sosial.

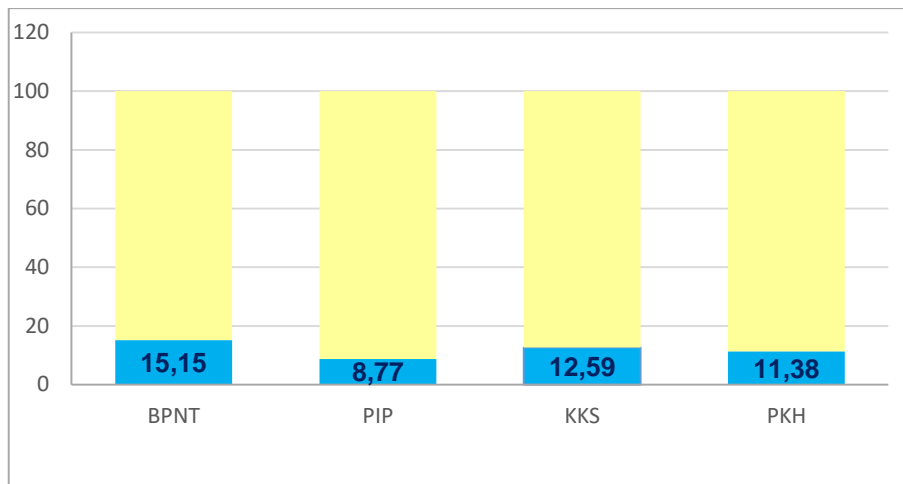
Pada tahun 2019, pemerintah menyusun program perlindungan sosial dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Empat program yang digulirkan adalah Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional, dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Pada tahun 2020 program-program perlindungan sosial tahun 2019 masih berlanjut. Selanjutnya, pemerintah meluncurkan program baru yaitu kartu prakerja dan bantuan subsidi gaji. Berdasar data hasil Susenas Maret Tahun 2020, ada sebanyak 15,15 persen rumah tangga di Kota Cirebon yang menerima bantuan pangan non tunai (BPNT). Selanjutnya, ada sebanyak 8,77 persen rumah tangga yang salah satu anggotanya merupakan penerima Program Indonesia Pintar. Rumah tangga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tercatat sebanyak 12,59 persen, namun tidak semua dapat menunjukkan kartunya. Sementara itu, terdapat 11,38 persen rumah tangga di Kota Cirebon yang pernah menjadi penerima Program Keluarga Harapan.



Grafik 24.

Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Perlindungan Sosial, 2020



Sumber : Susenas Maret Tahun 2020

<https://cirebonkota.bps.go.id>



<https://cirebonkota.bps.go.id>

DATA

Mencerdaskan Bangsa

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CIREBON**

Jl Sekarkemuning I Evakuasi Kota Cirebon 45136

Email: bps3274@bps.go.id Web: cirebonkota.bps.go.id

Telp: 0231- 485524 Fax: 0231 - 484403